

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
INTISARI.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pelindungan Hukum Bagi Rakyat	12
1. Pelindungan Hukum pada PERATUN	15
2. Tujuan Pelindungan Hukum	20
3. Pelindungan Hukum Bentuk Pembatasan Kekuasaan Pemerintah	23
B. Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)	26
1. Sejarah Pembentukan PERATUN	27
2. Tujuan Pembentukan PERATUN	33
3. Asas-Asas Hukum Acara pada PERATUN	35
4. Kompetensi Mengadili PERATUN	38
C. Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah pada PERATUN	45
1. Definisi Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah.....	45
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah	47
3. Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah.....	50
D. Ganti Rugi	54
1. Hakikat dan Definisi Ganti Rugi	54
2. Mekanisme Pemberian Ganti Rugi	57
3. Metode Konversi Nilai Uang dalam Ganti Rugi.....	59
4. Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi.....	63
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Jenis dan Sifat Penelitian	66
B. Cara dan Alat Pengumpulan Data	68
C. Jalanya Penelitian	71
D. Analisis Hasil	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Identifikasi Permasalahan Regulasi Ganti Rugi dalam Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah pada PERATUN.....	74

1.	Problematika Hierarki Peraturan dalam Pengaturan Ganti Rugi ..	75
2.	Ketidajelasan Kriteria dan Mekanisme Penentuan Ganti Rugi ...	85
3.	Problematika Batasan Nilai Ganti Rugi dalam PP No. 43/1991 ...	89
4.	Studi Kasus Putusan Ganti Rugi dalam Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pada PERATUN	94
a.	Konteks Kasus.....	95
1)	Kasus Program Pengendalian Banjir Kali Mampang	95
2)	Kasus Penghentian dan Pelarangan Perkebunan Kelompok Tani Tuasai.....	99
3)	Kasus Pembayaran Ganti Rugi Tanah Partikelir Hj. Sapia.....	104
b.	Analisis Putusan	114
B.	Redesain Regulasi Ganti Rugi dalam Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Pada PERATUN	126
1.	Reformulasi Peraturan Ganti Rugi	129
2.	Perumusan Kriteria dan Mekanisme Penentuan Ganti Rugi yang Jelas	132
3.	Penghapusan/Revisi Batasan Nilai Ganti Rugi	136
BAB V	PENUTUP	140
A.	Kesimpulan	140
B.	Saran	143
DAFTAR PUSTAKA	145

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perbedaan Fokus Penelitian Penulis/Keaslian Penelitian	10
Tabel 4.1. Perbandingan antara PP No. 43/1991 dan SEMA No. 2/2019	76